**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 ASEAN (*Association of Shoutheast Asia Nations*) merupakan organisasi Geo-politik dan Ekonomi Negara-negara di kawasan Asia tenggara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunai Darussalam, Vietnam, Filipina, Thailand, Laos dan kamboja. Pembentukan organisasi regional ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral antarnegara di kawasan Asia Tenggara bentuk kerjasama antarnegara itu meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dan perdamaian antar negara ASEAN.[[1]](#footnote-2) Adapun pembahasan selanjutnya akan menitikbertakan pada kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi yang dikenal dengan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) dengan tujuan menjadikan ASEAN sebagai sebuah kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi saing didalamnya terdapat aliran bebas dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin berkurang.[[2]](#footnote-3)

 Perkembangan global yang di alami oleh ASEAN menjadikan kawasan ini perlu melakukan kerjasama ekonomi di dunia internasional, mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara-negara lain di luar kawasan. Hal ini agar berbagai peluang kerjasama dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ASEAN untuk bersaing secara internasional, disamping itu ASEAN harus dapat menjadi pasar yang menarik bagi investasi asing. Melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas (*free Trade Area/ FTA*) ASEAN melakukan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara mitra seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan india. Dalam kerjasama ini pula setiap negara anggota ASEAN dapat melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang menjadi mitra ASEAN tersebut.

 Dari beberapa mitra ASEAN, Cina merupakan negara yang mengalami perkembangan paling pesat. Pasca reformasi Deng Xio ping, Cina mengalami kemajuan yang sangat besar terutama dalam bidang ekonomi. Faktanya saat ini Cina telah menjadi salah satu negara penggerak perkeonomian dunia. Hal ini terlihat pada produk-produk Cina yang telah mampu menjangkau berbagai belahan dunia. Selain luasnya wilayah perdagangan Cina juga memiliki kelebihan dimana harga produk yang di tawarkan jauh lebih murah. Disamping itu Cina memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan kemajuan tekhnologi serta infrastruktur lainnya yang tentu saja dapat menunjang kemajuan negara ini.

ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001 digelar*ASEAN-China Summit* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan Cina ini menyetujui usulan Cina untukmembentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong.[[3]](#footnote-4) Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam *ASEAN-China Summit* tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Pertemuan ini menyepakati *“Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation” (CEC)*, yang didalamnya termasuk FTA. Sejak pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.[[4]](#footnote-5)

 Kerjasama ACFTA ini sangat penting, mengingat tujuan-tujuan yang ingin dicapai bisa memberikan keuntungan yang begitu besar bagi negara-negara yang terlibat apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu tujuan yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama perdagangan yang dapat menguntungkan tanpa menjatuhkan yang satu dengan yang lainnya. Dalam kesepakatan tersebut juga akan merealisasikan liberalisasi jasa dan investasi dan juga investasi yang telah disepekati setelah tarif barang dilakukan, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Dari beberapa tujuan ini ASEAN memiliki harapan, beberapa harapan yang dapat dicapai dengan jalan melaksanakan ACFTA. salah satu tujuan tersebut adalah memperbaiki keadaan perekonomian di negara-negara ASEAN yang menurun drastis akibat krisis khususnya bagi Laos, Vietnam, Myanmar dan Kamboja.

 Dalam ACFTA seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada normal track sebelum 1 Juli 2006.[[5]](#footnote-6) Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2007. Dan seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga 1 Januari 2012.[[6]](#footnote-7) Dengan adanya pengurangan tarif tersebut perdagangan bebas antara Cina dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah di laksanakan tentu hal ini para pelaku yang bermain didalamya harus mampu memanfaatkan peluang yang ada agar dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

 Perjanjian ACFTA ini dilakukan dalam beberapa tahap, fase awal dari kesepakatan perdagangan ini, dikenal dengan Program Panen Awal (EHP- *Early Harvest Programme*), EHP adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif *Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. Ini mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2004, merupakan komitmen pemotongan tarif bagi produk-produk sektor pertanian ASEAN yang masuk ke China.[[7]](#footnote-8)

 Sejak perjanjian ACFTA mulai diberlakukan tentunya negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia telah mempersiapkan diri dalam mengahadapi peluang dan tantangan ada. Sebagai bagian dari keseriusan pemerintah mengawali dengan meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.[[8]](#footnote-9)

 Keputusan presiden no.48 tahun 2004, pasal 1:

Mengesahkan *framework Agreement on coomprehensiv Economic cooperation between the association of South East Asian Nations and the people’s Republik of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina), yang telah ditanda tangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom penh, Kamboja, apada tanggal 4 November 2002, sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Cina yang salinan naskah aslinya dalam bahasa inggris dan terjemahannya terlampir pada keputusan presiden ini.[[9]](#footnote-10)

 Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia telah siap dalam menghadapi ACFTA, namun kenyataan dilapangan berkata lain industri-industri sebagai penopang perekonomian Indonesia malah terkena dampak negatif dengan adanya ACFTA, akibatnya ekonomi Indonesia seakan jalan ditempat. Berdasarakan analisis dan perhitungan yang dilakukan oleh *Warta Ekonomi Intelegence Unit* ada delapan sektor industri di Indonesia yang terancam akibat implementasi ACFTA.[[10]](#footnote-11) Kedelapan sektor itu ialah sektor alas kaki, sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, sektor besi dan baja, sektor furnitur, sektor elektronik, sektor makanan dan minuman. Sektor-sektor yang terancam ini membuat pasar domestik Indonesia kalah bersaing dengan produk impor yang terus membanjiri pasar domestik Indonesia, khususnya barang Cina. fakta ini sejalan dengan hasil perhitungan BPS, dimana naraca perdagangan antara Indonesia dengan Cina kini mengalami defisit. Artinya nilai impor dari Cina masih lebih besar dibanding ekspor Indonesia ke Cina.[[11]](#footnote-12)

 Penyebab industri-industri di Indonesia tidak mampu bersaing dengan Cina, yaitu terkait sumber daya dan tenaga kerja yang mayoritas (60 persennya) masih berpendidikan level SD ke bawah.[[12]](#footnote-13) Kondisi ini tentu saja sangat mempengaruhi kualitas kerja dan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Selain itu juga tingkat suku bunga kredit yang masih tinggi. Berbeda dengan Indonesia, bunga pinjaman yang diterapkan pemerintah China dalam menggairahkan usaha rakyat hanya dipatok pemerintah antara 4-6 persen pertahun, sedangkan di Indonesia suku bunga kredit masih bertengger di angka 14-16 persen.[[13]](#footnote-14) Dengan suku bunga pinjaman sebesar itu, bisa dipastikan iklim usaha Indonesia akan terus menurun. Soal lain yang juga tak kalah penting adalah terkait penegakan dan juga kepastian hukum masalah yang satu ini memang sangat sulit untuk didapatkan solusinya.

 Stabilitas ekonomi yang baik didukung oleh langkah-langkah penguatan dalam sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi.[[14]](#footnote-15) Hal ini misalnya pada sektor industri dalam memproduksi barang, ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi mereka. Sebaliknya jika tidak ada dukungan dari sektor keuangan, industri domestik tersebut akan terhambat dalam melakukan produksi barang.

 Selain itu, eksistensi industri domestik banyak ditentukan oleh kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bentuk kebijakan pemerintah seperti penentuan tingkat suku bunga, penetapan tarif pajak, dan alokasi pemberian kredit, ketiga hal tersebut sangat menentukan ketersediaan modal untuk menunjang produksi domestik dalam negeri. Jadi apabila pemerintah menetapkan tingkat suku bunga dan pajak yang tinggi serta akses terhadap kredit yang sulit maka industri akan kekurangan modal, terjadi fluktuasi dalam jumlah barang yang diproduksi oleh industri domestik yang pada akhirnya berpeluang menyebabkan instabilitas ekonomi.

 Gambaran latar belakang yang dipaparkan di atas serta sedikit fakta-fakta yang terjadi, maka itulah menjadi alasan utama penulis untuk mengangkat pengaruh ACFTA terhadap perekonomian Indonesia saat ini sebab menurut penulis hal ini sangat menarik apabila dikaji lebih jauh serta menguraikan dan menganalisisnya lebih mendalam. penulis mengangkatnya dengan judul: *“PENGARUH ACFTA (ASEAN-CINA FREE TRADE AGREEMENT) TERHADAP STABILITAS INDUSTRI INDONESIA”.*

1. **Identifikasi Masalah**

Dalam hal ini penulis selaku peneliti mendapatkan beberapa masalah yang tercakup dalam latar belakang masalah. Adapun identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Indonesia melalui kerjasama ACFTA?
2. Bagaimana peluang dan tantangan Indonesia dalam kerjasama ACFTA?
3. Bagaimana dampak diberlakukannya ACFTA terhadap stabilitas industri Indonesia?
4. **Batasan Masalah**

 Pemberlakuan ACFTA di mulai pada tanggal 1 Januari 2010, tentu sebelum diberlakukannya perjanjian ini Indonesia sudah siap dengan segala persiapan dalam menghadapi ACFTA, namun permasalahan yang timbul dengan adanya perjanjian ini pasar domestik Indonesia di serbu bahkan dikuasai oleh produk-produk buatan Cina yang tentu hal ini berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Penulis akan mencoba menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia terkena dampak negatif dengan adanya perjanjian ini.

 ACFTA tidak akan memberi keuntungan apapun bagi Indonesia jika kesiapan Indonesia tidak dibangun, apabila menghadapi negara seperti Cina yang sudah berada jauh kedepan. Maka dari itu ACFTA harus jadi momentum yang menguntungkan bagi Indonesia. Indonesia perlu mengambil kebijakan-kebijakan agar mampu mengubah dan memperbaiki perekonomian Indonesia dengan adanya perjanjian ini. Sektor usaha yang berpotensi meraih kesempatan dengan adanya ACFTA ialah apabila sektor usaha itu mampu menjadi penopang ekonomi domestik. Adapun sektor industri yang mampu bersaing dengan produk-produk China yang terus membanjiri pasar Indonesia namun tidak di pungkiri masih banyak tantangan yang dihadapi, sektor industri tersebut ialah Tekstil dan industri Sepatu.

 Kedua sektor industri tersebut akan menjadi fokus kajian penulis dalam penelitian ini. Dalam perjanjian ACFTA kedua sektor industri tersebut masuk dalam kategori *Sensitive Track.* Adapun cakupan dalam *Sensitive Track* yang masih dibagi menjadi dua yakni *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List.* Industri sepatu tergolong ke dalam *Sensitive List* sedangkan industri tekstil di kategorikan ke dalam *Highly Sensiteve List.*

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mempermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **Sejauh mana Pengaruh ACFTA (ASEAN-CINA FREE TRADE AGREEMENT) terhadap stabilitas Industri Indonesia.**

1. **Tujuan dan kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui startegi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Indonesia melalui kerjasama ACFTA.
2. Mengetahui peluang dan tantangan Indonesia dalam kerjasama ACFTA.
3. Mengetahui dampak diberlakukannya ACFTA terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para peneliti hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah Internasional, khususnya Ekonomi Politik internasional.
6. Penelitian diharapakan pula dapat menjadi suatu bentuk masukan bagi para pengambil kebijakan dalam hal kesepakatan hubungan perdagangan bebas.
7. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
8. **Kerangka Teoritis**

Hubungan Internasional mencakup berbagai hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak. Hubungan ini dapat berlangsung secara kelompok, maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa dan negara lain. Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya adalah ilmu ini dapat menggunakan teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya.

Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang hubungan internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah hubungan internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian hubungan internasional.[[15]](#footnote-16)

Hubungan Internasional mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara didalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.[[16]](#footnote-17)

 **G.A. Lopez dan Michael S. Stohl**, berpendapat bahwa:

**“Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah”**.[[17]](#footnote-18)

Menurut **Holsti,** hubungan internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu.[[18]](#footnote-19)

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dalam dunia internasional yang telah menjadi perbincangan sejak tahun 1980. Globalisasi digambarkan sebuah situasi atau proses dimana setiap negara tidak lagi memiliki sekat-sekat antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, setiap negara maupun individu memiliki ruang gerak yang lebih luas dan juga peranan yang lebih luas pula. Globalisasi menjadikan berbagai aspek kehidupan menjadi lebih meluas baik itu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Namun yang terliat adanya globalisasi dalam bidang ekonomi.

 Globalisasi dalam bidang ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial negara.[[19]](#footnote-20) Dengan adanya Globalisasi ekonomi ini, setiap negara dapat memperluas wilayah penjualan barang-barang produksi dari dalam negerinya yang tentu saja akan akan mendatangkan keuntungan terhadap negara. Selain itu juga, jika dilihat dari segi konsumen tentu saja akan lebih beragam yang juga akan menguntungkan konsumen yang dapat memilki barang dengan kualitas terbaik dan juga dengan harga terjangkau.

 Globalisasi ekonomi ini menghasilkan sebuah bentuk perdagangan internasional yang hampir sama dengan keadaan dan tujuan globalisasi ekonomi yaitu *free trade* atau perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini telah diberlakukan di banyak negara, khususnya negara berkembang. Perdagangan bebas pertama kalai diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa. Hal ini dilakukan untuk membuka pasar mereka dan menjual produk mereka kewilayah yang lebih luas, selain itu memberikan pilihan pada konsumen dalam negeri yang lebih beragam.

Perdagangan bebas dapat juga dikatakan sebagai perdagangan terbuka atau perdagangan antar negara berdasarkan hukum keunggulan komparatif.[[20]](#footnote-21) Terbuka dalam artian bahwa negara menghapus berbagai aturan yang mengontrol dan membatasi perdagangan, yaitu tarif, peraturan-peraturan, standar standar tertentu seperti legislasi, ujuran-ukuran yang diregulasi serta pembatasan-pembatasan aliran kapital dan investasi. [[21]](#footnote-22)

Tujuh argumen moral untuk mendukung perdagangan bebas antar negara-negara Menurut **Daniel T. Griswola** yaitu :

*Free Trade Respects Individual Dignity and Sovereignty, Free Trade Restrains the Power of the State, Free Trade Encourages Individuals to Cultivate Moral Virtues, Free Trade Brings People Together, Free Trade Encourages Other Basic Human Rights, Free Trade Fosters Peace, Free Trade Feeds and Clothes the Poor. [[22]](#footnote-23)*

Ketika semua argumen yang ditimbang,harus menjadi jelas bahwa kebijakan bebasperdagangan moral serta efisien. perdagangan bebasmembatasi kekuasaan negara dan meningkatkankebebasan, otonomi,dan tanggung jawab pribadiindividu.[[23]](#footnote-24)Perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara dengan negara masing-masing akan membawa keuntungan apabila mampu berkompetisi dan mampu melihat peluang yang ada. Selain itu perdagangan bebas dapat menjadi pemicu para pelaku untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif.

 Menurut IMF Stabilitas ekonomi mengacu pada tidak adanya fluktuasi yang berlebihan di dalam makroekonomi.[[24]](#footnote-25) Sebuah ekonomi dengan cukup konstan pertumbuhan output dan inflasi yang rendah dan stabil akan dianggap ekonomi stabil. Menurut IMF Stabilitas ekonomi juga berkaitan dengan stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan didefinisikan dalam hal kemampuannya untukmemfasilitasi dan meningkatkan proses ekonomi, mengelola risiko, dan menyerap guncangan. Selain itu,stabilitas keuangan dianggap sebuah kontinum, berubah dari waktu ke waktu dan konsisten denganbeberapa kombinasi dari unsur-unsur keuangan.[[25]](#footnote-26)

 Menurut **Milton Friedman** stabilitas ekonomi mengacu pada *a monetary and fiscal framework.[[26]](#footnote-27)*Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.[[27]](#footnote-28)Dalam ilmu ekonomi dan ilmu politik, kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan pengumpulan pendapatan (pajak) untuk mempengaruhi ekonomi.[[28]](#footnote-29)Kebijakan fiskal dapat dibandingkan dengan jenis utama lain dari kebijakan makroekonomi, kebijakan moneter, yang mencoba untuk menstabilkan ekonomi dengan suku bunga mengendalikan dan pengeluaran. Dua instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut dalam perekonomianagregat permintaan dan tingkat aktivitas ekonomi, Pola alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan.[[29]](#footnote-30)

 ASEAN (*Association of Shoutheast Asia Nations*) merupakan organisasi Geo-politik dan Ekonomi Negara-negara di kawasan Asia tenggara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Thailand, Laos dan Kamboja. Pembentukan organisasi regional ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral antarnegara di kawasan Asia tenggara bentuk kerjasama antarnegara itu meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dan perdamaian antar negara ASEAN.[[30]](#footnote-31)

 ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001 digelar*ASEAN-China Summit* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan Cina ini menyetujui usulan Cina untukmembentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong.[[31]](#footnote-32) Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam *ASEAN-China Summit* tahun 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Pertemuan ini menyepakati *“Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation” (CEC)*, yang didalamnya termasuk FTA. Sejak pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.[[32]](#footnote-33)

1. **Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menarik suatu hipotesis sebagai berikut: **Dengan adanya kerjasama perdagangan bebas ACFTA maka akan terjadi peningkatan surplus di bidang industri tekstil dan alas kaki Indonesia.**

1. **Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritis) | Indikator (Empiris) | Verifikasi (Analisis) |
| Dengan adanya kerjasama perdagangan bebas ACFTA | Adanya Penandatanganan perdagangan bebas ASEAN-China | Data terkait Penandatanganan perdagangan bebas ASEAN-ChinaSumber: Danil Pambudi dan Alexander C. Chandra, Garuda *Terbelit Naga: Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China Terhadap Perekonomian Indonesi*a. Jakarta: Institute Global for Justice. |
| akan terjadi peningkatan surplus di bidang industri tekstil dan alas kaki Indonesia | Adanya peningkatan pendapatan dibidang industri tekstil dan alas kaki | Data terkait peningkatan pendapatan dibidang industri tekstil dan alas kakiSumber: Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/> |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

CHINA

ASEAN

Perdagangan Bebas ACFTA

Peningkatan Stabilitas Ekonomi dan Industri

INDONESIA

1. **Metode dan Tekhnik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasional, model induksionis dan model reduksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model analisis reduksionis dimana unit analisisnya berada pada tingkat yang lebih rendah daripada unit eksplanasinya.

1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research)* yang biasanya juga disebut dengan penelitian taksonomik, dimana tujuannya untuk eksplorasi dan klarifikasi. Dimulai dengan menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menjabarkan.

1. **Tekhnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak ada penelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang benar.

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang menunjang bagi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat-kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan di Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan di Bandung.
3. Perpustakaan Ali Alatas KEMLU di Jakarta.
4. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta.
5. Perpustakaan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) di Jakarta.
6. **Lama Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dua bulan.

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Berisikan uraian atau informasi umum/dasar/awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan vaiabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang latar belakang tentang Tinjauan Tentang ACFTA

**BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Stabilitas Ekonomi Indonesia.

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan terikat.

**BAB V: KESIMPULAN**

Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasannya dan kata penutup serta saran.

1. <http://www.anneahira.com/sejarah-asean.htm> di akses tanggal 1 september 2016 pkl.19.41 wib [↑](#footnote-ref-2)
2. Kementrian Republik Indonesia, *kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan mitra wicara*, Jakarta: Kementrian Republik Indonesia, 2010 [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11-policyforum/64-acfta-dan-indonesia>di akses tanggal 1 september 2016 pkl 21.34 wib [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
7. Daniel Pambudi dan Alexander C, Chandra, *Garuda Terbelit Naga-Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-Cina Terhadap Perekonomian Indonesia*. jakarata: Institute for Global Justice. 2006 hal.3 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004*, 15 juni 2004.( <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2004/048-04.pdf>) diakses tanggal 2 september 2016 pukul 20.00 wib [↑](#footnote-ref-9)
9. ibid [↑](#footnote-ref-10)
10. Ivan Limdan Philipp Kauppert, “Apa Pilihan untuk Indonesia”. *Jurnal Sosial Demokrasi- Perdagangan bebas ASEAN-Cina*: Berdagang Untuk Siapa? 2010, vol.8, Februari-jun. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
14. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EDADA5DD-29CC-4E36-9067-7C3ACCA654F2/20126/PeranBankSentralDalamMenjagaStabilitasSistimKeuang.pdf> diakses tanggal 2 september 2016 pukul 21.00 wib [↑](#footnote-ref-15)
15. Rudy, T. May. (1992). *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*: Refika Aditama. Hal 5 [↑](#footnote-ref-16)
16. Mas’oed Mochtar, (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES hal 28 [↑](#footnote-ref-17)
17. A. Lopez, George dan Michael S. Stohl. (1989). *International Relations: Contemporary Theory and Practice*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press. Hal 3 [↑](#footnote-ref-18)
18. Holsti, K.J. (1992). *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta. Hal 29 [↑](#footnote-ref-19)
19. Apridar, *Ekonomi Internasioanal: teori, konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2009 [↑](#footnote-ref-20)
20. Martin Grifftihs and Terry O’Callagahan, *international Relations: The Key Concepts*, London: Routledge.2002 [↑](#footnote-ref-21)
21. Anup Shah,*keepentingan Utama Globalisasi,* The Institute Of Global Justice & Lembaga Pembebasan , Jakarta :Media dan Ilmu Sosial, 2004 [↑](#footnote-ref-22)
22. <http://www.cato.org/pubs/policy_report/v23n4/freetrade.pdf> di akses tanggal 2 September 2016 pukul 21.45 wib [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid [↑](#footnote-ref-24)
24. <http://www.imf.org/External/np/exr/facts/pdf/globstab.pdf> di akses tanggal 3 september 2016 pukul 20.00 wib [↑](#footnote-ref-25)
25. <http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/fmi/wp/wp04187.pdf> di akses tanggal 3 september 2016 pukul 20.06 wib [↑](#footnote-ref-26)
26. <http://www.fpif.org/search?q=economic+stability> di akses tanggal tanggal 3 september 2016 pukul 20.20 wib [↑](#footnote-ref-27)
27. <http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya> di akses tanggal tanggal 3 september 2016pukul 21.00 wib [↑](#footnote-ref-28)
28. <http://en.wikipedia.org/wiki/Fiscal_policy> diakses tanggal tanggal 3 september 2016pukul 20.45 wib [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid [↑](#footnote-ref-30)
30. <http://www.anneahira.com/sejarah-asean.htm> di akses tanggal tanggal 3 september 2016pkl.19.41 wib [↑](#footnote-ref-31)
31. <http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11-policyforum/64-acfta-dan-indonesia> di akses tanggal tanggal 3 september 2016pkl 21.34 wib [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid [↑](#footnote-ref-33)